ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Vol.5, No.8, Juli 2026

Strategi Pemerintah Desa dalam Implementasi Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di Desa Renrua, Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu

Maria Ervina Taek Sikone[1], Aris Lambe[2], Hildigardis M. I. Nahak[3], Yos E. Jelahut[4]
[1,2,3,4]Universitas Nusa Cendana, Kupang, NTT, Indonesia
Email : sikoneervin9@gmail.com

Article History:
Received: 10 Juli 2026
Revised: 22 Juli 2026
Accepted: 24 Juli 2026

Keywords: *strategi pemerintah desa, implementasi kebijakan, Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), sanitasi, partisipasi masyarakat.*

Abstract: *Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi pemerintah desa dalam mengimplementasikan Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di Desa Renrua, Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik penentuan informan secara purposive sampling. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pemerintah desa dalam implementasi STBM dilakukan melalui empat tahapan utama, yaitu perencanaan dan penganggaran, sosialisasi dan edukasi, pelaksanaan program, serta monitoring dan evaluasi. Strategi tersebut melibatkan pemerintah desa, kader kesehatan, Badan Permusyawaratan Desa, dan masyarakat sebagai aktor utama dalam mendorong perubahan perilaku sanitasi. Implementasi program telah meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sanitasi yang layak, meskipun masih dijumpai berbagai kendala, seperti keterbatasan sarana sanitasi, rendahnya kesadaran sebagian masyarakat, dan perlunya penguatan pendampingan secara berkelanjutan. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi STBM dipengaruhi oleh sinergi antaraktor, komitmen pemerintah desa, serta partisipasi aktif masyarakat dalam mewujudkan perilaku hidup bersih dan sehat.*

PENDAHULUAN

Sanitasi merupakan salah satu aspek mendasar dalam pembangunan kesehatan masyarakat karena berkaitan erat dengan upaya pencegahan penyakit, peningkatan kualitas hidup, dan keberlanjutan lingkungan. Pemerintah Indonesia menjadikan sanitasi sebagai salah satu prioritas pembangunan melalui Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), yaitu pendekatan yang menekankan perubahan perilaku masyarakat melalui pemberdayaan tanpa bergantung pada subsidi pembangunan sarana. STBM terdiri atas lima pilar, yaitu Stop Buang Air Besar

Sembarangan (SBS), Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS), Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga (PAMMRT), Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (PSRT), dan Pengelolaan Air Limbah Domestik Rumah Tangga (PALDRT). Kelima pilar tersebut diarahkan untuk mewujudkan perilaku hidup bersih dan sehat serta menurunkan risiko penyakit berbasis lingkungan (Kementerian Kesehatan RI, 2014).

Pelaksanaan STBM juga mendukung *pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs),* khususnya tujuan keenam mengenai akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak. Untuk mempercepat pencapaian target tersebut, pemerintah menetapkan berbagai kebijakan, di antaranya Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 852 Tahun 2008 yang kemudian diperbarui melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat. Kebijakan tersebut menekankan tiga komponen utama implementasi, yaitu *enabling environment*, *demand creation*, dan *supply improvement*, yang menjadi dasar dalam mendorong perubahan perilaku sanitasi masyarakat secara berkelanjutan.

Meskipun demikian, implementasi STBM di berbagai daerah masih menghadapi tantangan yang cukup kompleks. Perubahan perilaku masyarakat terhadap praktik sanitasi tidak hanya dipengaruhi oleh tersedianya fasilitas, tetapi juga oleh tingkat pengetahuan, kebiasaan, kondisi sosial budaya, serta efektivitas strategi yang diterapkan oleh pemerintah desa. Oleh karena itu, keberhasilan program STBM tidak dapat diukur semata-mata dari pembangunan sarana sanitasi, tetapi juga dari kemampuan pemerintah dalam menggerakkan partisipasi masyarakat untuk mengadopsi perilaku hidup bersih dan sehat secara berkelanjutan.

Kondisi tersebut juga ditemukan di Desa Renrua, Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu. Hasil observasi awal menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih melakukan buang air besar sembarangan karena keterbatasan kepemilikan jamban sehat. Selain itu, kepemilikan fasilitas cuci tangan pakai sabun, pengelolaan air minum dan makanan, pengelolaan sampah rumah tangga, serta pengelolaan limbah cair domestik juga masih relatif rendah. Meskipun pemerintah desa terus meningkatkan penyediaan sarana sanitasi, pemanfaatannya belum sepenuhnya optimal sehingga diperlukan strategi implementasi yang mampu mendorong perubahan perilaku masyarakat.

Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa implementasi STBM memberikan kontribusi terhadap peningkatan perilaku hidup bersih masyarakat. Kumarayanti et al. (2020) menemukan bahwa edukasi mengenai Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) berpengaruh terhadap peningkatan pengetahuan masyarakat dalam mencegah diare. Sementara itu, Haris et al. (2025) menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan STBM pada pilar pengelolaan sampah rumah tangga masih dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya dan rendahnya edukasi kepada masyarakat. Namun, kedua penelitian tersebut lebih berfokus pada efektivitas pelaksanaan salah satu pilar STBM sehingga belum menjelaskan secara komprehensif strategi pemerintah desa dalam mengimplementasikan keseluruhan program STBM melalui proses perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini menawarkan perspektif yang berbeda dengan menganalisis strategi pemerintah desa dalam mengimplementasikan Program STBM secara menyeluruh menggunakan teori implementasi kebijakan Merilee S. Grindle. Teori ini memandang keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh isi kebijakan (*content of policy*) dan konteks implementasi (*context of implementation*), sehingga relevan untuk menjelaskan bagaimana strategi pemerintah desa diterapkan dalam mendorong partisipasi masyarakat serta mengatasi berbagai kendala yang muncul selama pelaksanaan program.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi

pemerintah Desa Renrua dalam mengimplementasikan Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) melalui tahapan perencanaan dan penganggaran, sosialisasi dan edukasi, pelaksanaan program, serta monitoring dan evaluasi guna mendorong peningkatan perilaku sanitasi masyarakat secara berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai strategi pemerintah desa dalam mengimplementasikan Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan fenomena secara komprehensif berdasarkan pengalaman, pandangan, dan interaksi para aktor yang terlibat dalam pelaksanaan program.

Penelitian dilaksanakan di Desa Renrua, Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu. Lokasi penelitian dipilih secara purposif dengan mempertimbangkan masih ditemukannya berbagai permasalahan sanitasi, seperti rendahnya akses terhadap sanitasi dasar, tingginya praktik buang air besar sembarangan, serta adanya pelaksanaan Program STBM sebagai upaya pemerintah desa dalam meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat.

Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu memilih individu yang dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait implementasi Program STBM. Informan berjumlah 15 orang yang terdiri atas pemerintah desa (Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa), tiga kader kesehatan desa, serta sembilan orang masyarakat sebagai penerima manfaat program. Pemilihan informan tersebut dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang komprehensif mengenai strategi pemerintah desa dalam setiap tahapan implementasi program.

Data penelitian diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dokumentasi, dan studi literatur. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung kondisi sanitasi dan pelaksanaan program di lapangan. Wawancara mendalam digunakan untuk menggali informasi mengenai strategi yang diterapkan pemerintah desa serta pengalaman para informan selama pelaksanaan STBM. Dokumentasi dimanfaatkan untuk melengkapi data berupa dokumen, foto, dan arsip yang berkaitan dengan penelitian, sedangkan studi literatur dilakukan untuk memperkuat landasan teoritis dan kerangka analisis penelitian.

Analisis data dilakukan secara interaktif menggunakan model Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi dan mengelompokkan data sesuai fokus penelitian, kemudian data disajikan dalam bentuk narasi agar mudah dipahami. Tahap akhir dilakukan melalui interpretasi terhadap seluruh data untuk menemukan pola, hubungan antartemuan, serta menyusun kesimpulan yang menjawab tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi Pemerintah Desa dalam Implementasi Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pemerintah Desa Renrua dalam mengimplementasikan Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dilakukan secara bertahap melalui empat strategi utama, yaitu **perencanaan dan penganggaran, sosialisasi dan edukasi, pelaksanaan program, serta monitoring dan evaluasi**. Keempat strategi tersebut saling berkaitan dalam mendorong perubahan perilaku masyarakat menuju praktik sanitasi yang

lebih baik. Implementasi strategi tidak hanya berorientasi pada penyediaan sarana sanitasi, tetapi juga menekankan pemberdayaan masyarakat agar mampu berpartisipasi secara aktif dalam setiap tahapan program. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi STBM dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah desa membangun kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, terutama kader kesehatan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat sebagai sasaran utama program.

Perencanaan dan Penganggaran Program STBM

Perencanaan merupakan tahap awal yang menentukan arah pelaksanaan Program STBM di Desa Renrua. Berdasarkan hasil wawancara, pemerintah desa menyusun rencana program melalui forum musyawarah yang melibatkan aparat desa, kader kesehatan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan perwakilan masyarakat. Keterlibatan berbagai aktor tersebut bertujuan mengidentifikasi kondisi sanitasi masyarakat, menentukan kebutuhan prioritas, serta menyusun alokasi anggaran yang mendukung pelaksanaan program. Melalui proses tersebut, pemerintah desa berupaya memastikan bahwa pelaksanaan STBM sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat dan memperoleh dukungan dari seluruh pihak yang terlibat.

Strategi perencanaan yang bersifat partisipatif menunjukkan adanya komitmen pemerintah desa dalam menciptakan tata kelola program yang inklusif. Keterlibatan masyarakat sejak tahap perencanaan memberikan ruang bagi warga untuk menyampaikan permasalahan sanitasi yang dihadapi sehingga keputusan yang dihasilkan lebih responsif terhadap kondisi lokal. Selain itu, penyusunan anggaran dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan pelaksanaan kegiatan sosialisasi, pendampingan, serta monitoring program agar seluruh tahapan implementasi dapat berjalan secara berkelanjutan.

Dalam perspektif teori implementasi kebijakan Merilee S. Grindle, strategi tersebut mencerminkan dimensi *content of policy,* khususnya terkait kejelasan tujuan kebijakan, pembagian sumber daya, serta keterlibatan kelompok sasaran dalam implementasi kebijakan. Perencanaan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan memperlihatkan bahwa pemerintah desa tidak hanya berfokus pada penyediaan fasilitas sanitasi, tetapi juga membangun komitmen bersama untuk mencapai tujuan program. Kejelasan sasaran dan dukungan sumber daya menjadi faktor penting yang memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan di tingkat desa.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Haris et al. (2025) yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi STBM memerlukan dukungan perencanaan yang matang serta ketersediaan sumber daya yang memadai. Namun demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa aspek partisipasi masyarakat sejak tahap perencanaan menjadi faktor penting yang memperkuat implementasi program, sehingga strategi pemerintah desa tidak hanya berorientasi pada aspek administratif, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat sebagai aktor utama perubahan perilaku.

Sosialisasi dan Edukasi kepada Masyarakat

Setelah proses perencanaan selesai, pemerintah desa melaksanakan strategi sosialisasi dan edukasi sebagai upaya meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya sanitasi. Sosialisasi dilakukan melalui pertemuan desa, penyuluhan kesehatan, dan kegiatan edukasi yang dipandu oleh kader kesehatan dengan dukungan pemerintah desa. Materi yang disampaikan mencakup lima pilar STBM, manfaat sanitasi yang layak, serta risiko kesehatan akibat perilaku sanitasi yang buruk.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi menjadi strategi utama dalam

membangun kesadaran masyarakat. Sebagian besar informan menyatakan bahwa sebelum adanya program STBM, pengetahuan masyarakat mengenai sanitasi masih terbatas sehingga berbagai perilaku yang tidak sehat, seperti buang air besar sembarangan dan pengelolaan sampah yang kurang baik, masih sering ditemukan. Melalui kegiatan edukasi yang dilakukan secara berulang, masyarakat mulai memahami pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesehatan keluarga.

Strategi edukasi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah desa tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga sebagai fasilitator perubahan sosial. Pendekatan yang digunakan lebih menekankan pada penyadaran masyarakat dibandingkan dengan pemberian sanksi, sehingga perubahan perilaku diharapkan muncul atas dasar kesadaran masyarakat sendiri. Pendekatan ini sesuai dengan prinsip dasar STBM yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam mewujudkan sanitasi total berbasis perubahan perilaku.

Dalam teori implementasi kebijakan Grindle, keberhasilan sosialisasi dipengaruhi oleh *context of implementation,* khususnya karakteristik sosial masyarakat, kemampuan pelaksana program, serta tingkat respons kelompok sasaran terhadap kebijakan. Pemerintah desa memanfaatkan kader kesehatan sebagai agen perubahan yang memiliki kedekatan dengan masyarakat sehingga proses penyampaian informasi menjadi lebih efektif. Kepercayaan masyarakat terhadap kader kesehatan turut meningkatkan penerimaan terhadap pesan-pesan sanitasi yang disampaikan.

Hasil penelitian ini memperkuat temuan Kumarayanti et al. (2020) yang menunjukkan bahwa edukasi kesehatan mampu meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai perilaku hidup bersih dan sehat. Akan tetapi, penelitian ini memperlihatkan bahwa edukasi dalam implementasi STBM tidak hanya bertujuan meningkatkan pengetahuan, tetapi juga membangun partisipasi masyarakat dalam seluruh proses pelaksanaan program.

Pelaksanaan Program STBM

Tahap pelaksanaan merupakan implementasi nyata dari perencanaan yang telah disusun oleh pemerintah Desa Renrua. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan Program STBM dilakukan melalui kolaborasi antara pemerintah desa, kader kesehatan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta masyarakat sebagai penerima manfaat. Setiap pihak memiliki peran sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, di mana pemerintah desa berperan dalam koordinasi program, kader kesehatan bertugas memberikan pendampingan dan edukasi, sedangkan masyarakat menjadi pelaku utama dalam menerapkan lima pilar STBM di lingkungan tempat tinggalnya.

Pelaksanaan program tidak hanya diarahkan pada penyediaan fasilitas sanitasi, tetapi lebih menitikberatkan pada perubahan perilaku masyarakat. Pemerintah desa berupaya mendorong masyarakat untuk menghentikan praktik buang air besar sembarangan, membiasakan cuci tangan menggunakan sabun, menjaga kebersihan air minum dan makanan, mengelola sampah rumah tangga dengan baik, serta mengelola limbah cair domestik secara aman. Strategi tersebut dilakukan melalui pendampingan secara berkelanjutan agar masyarakat mampu menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program telah memberikan perubahan positif terhadap kesadaran masyarakat mengenai pentingnya sanitasi. Sebagian masyarakat mulai memanfaatkan jamban sehat, menjaga kebersihan lingkungan, serta lebih memperhatikan pengelolaan sampah dan limbah rumah tangga. Meskipun demikian, perubahan perilaku belum berlangsung secara merata. Masih terdapat sebagian masyarakat yang belum sepenuhnya

menerapkan seluruh pilar STBM karena keterbatasan ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, serta kuatnya kebiasaan yang telah berlangsung dalam waktu yang lama. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perubahan perilaku sanitasi merupakan proses sosial yang membutuhkan waktu dan pendampingan secara berkelanjutan.

Dalam perspektif teori implementasi kebijakan Merilee S. Grindle, keberhasilan pelaksanaan program dipengaruhi oleh kesesuaian antara isi kebijakan dengan kondisi masyarakat sebagai kelompok sasaran. Kejelasan tujuan program, pembagian peran antaraktor, serta dukungan sumber daya memungkinkan implementasi berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Namun demikian, efektivitas pelaksanaan juga sangat ditentukan oleh kondisi sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat yang menjadi konteks implementasi kebijakan. Dengan demikian, keberhasilan STBM tidak hanya bergantung pada kebijakan yang dirancang pemerintah, tetapi juga pada kemampuan pelaksana dalam menyesuaikan strategi dengan karakteristik masyarakat setempat.

Temuan penelitian ini sejalan dengan pendapat Grindle yang menegaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan proses yang dipengaruhi oleh interaksi antara isi kebijakan dan konteks implementasinya. Dalam konteks Desa Renrua, strategi pemerintah desa yang mengedepankan partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam membangun komitmen bersama untuk mewujudkan sanitasi yang lebih baik. Oleh karena itu, keberhasilan pelaksanaan STBM tidak hanya tercermin dari tersedianya fasilitas sanitasi, tetapi juga dari meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mengubah perilaku menuju pola hidup yang lebih sehat.

Monitoring dan Evaluasi Program STBM

Monitoring dan evaluasi merupakan tahapan akhir yang dilakukan pemerintah Desa Renrua untuk memastikan bahwa pelaksanaan Program STBM berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil penelitian, kegiatan monitoring dilakukan secara berkala oleh kader kesehatan bersama pemerintah desa melalui kunjungan ke setiap dusun untuk mengamati perkembangan penerapan lima pilar STBM oleh masyarakat. Hasil pemantauan kemudian didokumentasikan dan dilaporkan kepada pemerintah desa serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program.

Monitoring tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengawasan, tetapi juga sebagai sarana pembinaan kepada masyarakat. Dalam setiap kegiatan pemantauan, kader kesehatan memberikan arahan, motivasi, dan edukasi kepada masyarakat yang belum menerapkan perilaku sanitasi sesuai dengan prinsip STBM. Pendekatan yang bersifat persuasif tersebut bertujuan membangun kesadaran masyarakat sehingga perubahan perilaku dapat berlangsung secara sukarela dan berkelanjutan. Dengan demikian, monitoring menjadi bagian penting dalam menjaga konsistensi implementasi program sekaligus mengidentifikasi berbagai hambatan yang muncul di lapangan.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa implementasi Program STBM telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan perilaku sanitasi masyarakat. Masyarakat mulai menunjukkan kesadaran yang lebih tinggi terhadap pentingnya penggunaan jamban sehat, kebiasaan mencuci tangan menggunakan sabun, serta pengelolaan lingkungan yang lebih baik. Namun demikian, pemerintah desa masih menghadapi beberapa kendala, antara lain keterbatasan sarana sanitasi pada sebagian rumah tangga, rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, serta masih adanya kebiasaan lama yang sulit diubah dalam waktu singkat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pencapaian sanitasi total memerlukan proses pendampingan yang berkelanjutan dan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan.

Analisis berdasarkan teori implementasi kebijakan Merilee S. Grindle menunjukkan bahwa monitoring dan evaluasi merupakan bagian dari upaya menyesuaikan implementasi kebijakan dengan dinamika yang berkembang di masyarakat. Melalui evaluasi yang dilakukan secara berkala, pemerintah desa memperoleh informasi mengenai tingkat keberhasilan program, hambatan implementasi, serta kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi. Informasi tersebut menjadi dasar dalam melakukan perbaikan strategi agar implementasi STBM semakin efektif dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pemerintah Desa Renrua dalam mengimplementasikan Program STBM telah berjalan melalui tahapan yang sistematis, yaitu perencanaan dan penganggaran, sosialisasi dan edukasi, pelaksanaan program, serta monitoring dan evaluasi. Keempat strategi tersebut saling melengkapi dalam membangun partisipasi masyarakat dan mendorong perubahan perilaku sanitasi. Meskipun masih dijumpai beberapa kendala dalam implementasinya, kolaborasi antara pemerintah desa, kader kesehatan, BPD, dan masyarakat menjadi modal utama dalam mewujudkan tujuan Program STBM secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa strategi pemerintah Desa Renrua dalam mengimplementasikan Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dilaksanakan melalui empat tahapan utama, yaitu perencanaan dan penganggaran, sosialisasi dan edukasi, pelaksanaan program, serta monitoring dan evaluasi. Strategi tersebut menunjukkan bahwa implementasi STBM tidak hanya berorientasi pada penyediaan sarana sanitasi, tetapi juga menitikberatkan pada upaya pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan pengetahuan, kesadaran, dan partisipasi aktif dalam menerapkan lima pilar STBM. Keterlibatan pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, kader kesehatan, dan masyarakat menjadi faktor penting yang mendukung keberlangsungan pelaksanaan program.

Analisis berdasarkan teori implementasi kebijakan Merilee S. Grindle menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi STBM dipengaruhi oleh keterpaduan antara isi kebijakan *(content of policy)* dan konteks implementasi *(context of implementation)*. Kejelasan tujuan program, dukungan sumber daya, pembagian peran antaraktor, serta kondisi sosial masyarakat menjadi faktor yang menentukan efektivitas implementasi kebijakan di tingkat desa. Meskipun pelaksanaan program telah meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sanitasi, penelitian ini juga menemukan bahwa keterbatasan sarana sanitasi, tingkat pendidikan masyarakat, dan kebiasaan yang telah mengakar masih menjadi tantangan dalam mewujudkan perubahan perilaku secara menyeluruh.

Secara praktis, penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan Program STBM memerlukan komitmen pemerintah desa untuk terus memperkuat koordinasi lintas sektor, meningkatkan intensitas edukasi kepada masyarakat, serta melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan. Pendekatan yang partisipatif dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat menjadi strategi yang efektif dalam membangun perubahan perilaku sanitasi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, penguatan kapasitas pemerintah desa, kader kesehatan, dan partisipasi masyarakat perlu terus dikembangkan agar tujuan Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat dapat tercapai secara optimal.

DAFTAR REFERENSI

Adi, I. R. (2007). *Intervensi komunitas: Pengembangan masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat*. PT RajaGrafindo Persada.

Ali, M. N. (2018). *Partisipasi masyarakat dalam mengembangkan kepariwisataan Desa Kersik menuju desa wisata di Kecamatan Marangkayu*.

Benu, F., & Muskanan, M. W. (2022). *Community participation and sustainable tourism development model in Komodo National Park*.

Dwiningrum, S. I. A. (2011). *Desentralisasi dan partisipasi masyarakat dalam pendidikan*. Pustaka Pelajar.

Echols, J. M., & Shadily, H. (2000). *Kamus Inggris–Indonesia: An English–Indonesian dictionary*. PT Gramedia Pustaka Utama.

Hadi, S. (1996). *Metode penelitian*. Ghalia Indonesia.

Hartono. (1974). *Pengantar ilmu pariwisata*. Fakultas Pascasarjana Universitas Gadjah Mada.

Ismayanti. (2010). *Pengantar pariwisata*. PT Grasindo.

Jalal, F., & Supriadi, D. (2001). *Reformasi pendidikan dalam konteks otonomi daerah*. Adicita Karya Nusa.

Kalsoem, C. D. M. (1988). *Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat*. Ghalia Indonesia.

Koentjaraningrat. (1987). *Metode dan teknik penelitian masyarakat*. Gramedia.

Kusmayadi, & Ervina. (1999). *Pengembangan pariwisata objek wisata Pantai Sigandu Kabupaten Batang*. Universitas Diponegoro.

Mak, B. K. L., & Cheung, L. T. O. (2024). *Community participation in the decision-making process for sustainable tourism development in rural areas of Hong Kong, China*.

Mill, R. C. (2000). *Tourism: The international business*. PT Grafindo Pustaka.

Muda, F. P. (2022). *Community participation in Indonesian sustainable tourism: A systematic review of models, impacts, and gaps*.

Ndraha, T. (1982). *Partisipasi dalam pembangunan*. LP3ES.

Oakley, P. (1991). *Projects with people: The practice of participation in rural development*. International Labour Office.

Oetomo. (1980). *Partisipasi masyarakat dalam pembangunan sosial*. Ghalia Indonesia.

Palimbunga, I. P. (2020). *Bentuk partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata di Kampung Wisata Tablanusu Kabupaten Jayapura Provinsi Papua*.

Pendit, N. S. (1994). *Ilmu pariwisata*. Pradnya Paramita.

Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepariwisataan.

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang *Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (RIPPARDA).*

Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang *Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan.*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang *Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (RIPPARNAS) Tahun 2010–2025.*

Pitana, I. G., & Diarta, I. K. S. (2009). *Pengantar ilmu pariwisata*. Andi.

Rahmanda, V., et al. (2019). *Partisipasi masyarakat lokal dalam mengembangkan objek wisata di Pantai Salido Kecamatan IV Jurai Pesisir Selatan*.

Roesli, U. (1999). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004*. Pustaka Widyatama.

Sastropoetro, S. (1988). *Partisipasi, komunikasi persuasif, dan disiplin pembangunan nasional*. Alumni.

Smith, V. L. (1989). *Hosts and guests: The anthropology of tourism*. University of Pennsylvania Press.
Soetrisno, L. (2004). *Menuju masyarakat partisipatif*. Kanisius.
Spillane, J. J. (1985). *Ekonomi pariwisata: Sejarah dan prospeknya*. Kanisius.
Sugiyono. (2011). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
Sumampouw, M. (2004). Perencanaan darat-laut yang terintegrasi dengan menggunakan spasial yang partisipatif. Dalam J. Rais et al. (Ed.), *Menata ruang laut terpadu* (hlm. 91–117). Pradnya Paramita.
Sumaryadi, I. N. (2010). *Sosiologi pemerintahan*. Ghalia Indonesia.
Suqiyah. (2001). *Klasifikasi partisipasi*. http://sacafirmansyah.wordpress.com/2009/06/05
Suryadana, M. L., & Octavia, V. (2015). *Pengantar pemasaran pariwisata*. Alfabeta.
Suryono, A. (2001a). *Ekonomi politik pembangunan dalam perspektif teori ilmu sosial*.
Suryono, A. (2001b). *Teori dan isu pembangunan*. Universitas Negeri Malang Press.
Suwantoro, G. (1997). *Dasar-dasar pariwisata*. Andi.
Tahwin, M. (2003). Pengembangan objek wisata sebagai sebuah industri. *Gemawisata, 1*.
Tangkilisan, H. N. S. (2005). *Manajemen publik*. Grasindo.
Teguh Yuwono. (2001). *Manajemen otonomi daerah*. Pusat Kajian Otonomi Daerah dan Kebijakan Publik Universitas Diponegoro.
Tilaar, H. A. R. (2009). *Kekuasaan dan pendidikan: Kajian manajemen pendidikan nasional dalam pusaran kekuasaan*. Rineka Cipta.
Tjokroamidjojo, B. (1982). *Pengantar administrasi pembangunan*. LP3ES.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.
Vredenbregt, J. (1987). *Metode dan teknik penelitian masyarakat*. Gramedia.
Wahab, S. (1997). *Pemasaran pariwisata*. Pradnya Paramita.
Whelan, T. (1991). *Nature tourism*. Island Press.
Yoeti, O. A. (1996). *Pengantar ilmu pariwisata*. Angkasa.
Yoeti, O. A. (2008). *Ekonomi pariwisata: Introduksi, informasi, dan aplikasi*. Kompas.
Yulianti. (2006). *Partisipasi masyarakat dalam perbaikan dan pemeliharaan lingkungan permukiman di Kelurahan Batu Sembilan Kecamatan Tanjung Timur* (Tesis Magister). Universitas Diponegoro.